BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori, Adapun definisi mengenai sistem, informasi, sistem informasi, akuntansi, akrual basis, cash basis, SAIBA, SPP, SPM, dan SP2D menurut para ahli sebagai berikut:

3.1.1 Sistem

3.1.1.1 Definisi Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ini adalah beberapa definisi sistem yang telah dikemukakan:

Menurut Yakub (2012:1): "Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu".

Menurut McLeod, Jr dalam Prasojo. (2011:152): "Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3.1.2 Informasi

3.1.2.1 Definisi Informasi

Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti "garis besar, konsep, ide". Informasi merupakan kata benda dari *informare* yang berarti aktivitas dalam "pengetahuan yang dikomunikasikan". Berikut ini adalah beberapa definisi informasi yang telah dikemukakan:

Menurut Laudon & Laudon dalam Kadir (2010:3): "informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi manusia".

Menurut Sutarman (2010 : 14): "Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

3.1.3 Sistem Informasi

3.1.3.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditujukan untuk pengolahan (menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan) informasi. Berikut ini adalah beberapa definisi sistem informasi yang telah dikemukakan:

Menurut O'brian dalam Yakub (2012:16): "sistem informasi (information system) merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi".

Menurut Azhar Susanto (2013:55): "sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk pengambilan keputusan.

3.1.4 Akuntansi

3.1.4.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi sering disebut sebagai "Bahasanya Dunia Usaha" karena akuntansi akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya dan pihak luar untuk mengambil keputusan. Berikut ini adalah beberapa definisi akuntansi yang telah dikemukakan:

Menurut Rudianto (2010): "Akuntansi adalah sebagai sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan".

Menurut Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono (2010:1): "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksud agar

berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam pengambilan pilihan-pilihan peralasan dari berbagai tindakan akuntansi".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan-tindakan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

3.1.5 Akrual Basis

3.1.5.1 Definisi Akrual Basis

Dalam ilmu akuntansi dikenal adanya 2 metode pencatatan transaksi salah satunya adalah akrual basis. Berikut ini adalah beberapa definisi akrual basis yang telah dikemukakan:

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang Mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: "Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut".

Menurut Direktur Jendral Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono (2015): "Bahwa dengan sistem akrual maka penerimaan Negara akan dicatat pada saat negara memiliki hak penerimaan, dan belanja dicatat pada saat pemerintah sudah berkewajiban untuk membayar".

Menurut Suryo Adiprojo (2015): "Akrual basis adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akrual basis adalah suatu metode akuntansi dimana transaksi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada setiap transaksi yang terjadi berdasarkan pengakuan yang sesungguhnya. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan para pengguna laporan keuangan.

3.1.6 Cash Basis

3.1.6.1 Definisi Cash Basis

Dalam ilmu akuntansi dikenal adanya 2 metode pencatatan transaksi salah satunya adalah cash basis. Berikut ini adalah beberapa definisi cash basis yang telah dikemukakan:

Menurut Direktur Jendral Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono (2015): “Pada cash basis pencatatan penerimaan uang pada saat kita menerima , sedangkan pencatatan belanja dicatat pada saat uang keluar”.

Menurut Suryo Adiprojo (2015): “Cash basis adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya kas masuk dan kas keluar serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar”.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cash basis adalah suatu metode pencatatan dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya kas masuk dan kas keluar sesuai dengan jumlah nominal yang diterima.

3.1.7 SAIBA

3.1.7.1 Definisi SAIBA

Mulai tahun 2015 pemerintah harus sudah menerapkan akuntansi dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka penerapan basis akrual pemerintah pusat mengembangkan aplikasi SAIBA ini. Berikut ini adalah beberapa definisi SAIBA yang telah dikemukakan:

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang Mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: "SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual".

Menurut Mukhtaromin (2014): "SAIBA merupakan modifikasi dari aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Modifikasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah dan SAPP".

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa SAIBA adalah suatu aplikasi akuntansi pemerintah pusat untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang merupakan modifikasi dari SAI untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah.

3.1.8 SPP, SPM, dan SP2D

3.1.8.1 Definisi SPP, SPM, dan SP2D

Dalam pembuatan laporan keuangan pada SAIBA, harus adanya dokumen sumber transaksi dalam hal ini adalah SPP, SPM, dan SP2D. Berikut ini adalah definisi SPP, SPM, dan SP2D yang telah dikemukakan:

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 59/2007, dan Prmendagri 21/2011 mendefinisikan bahwa: "Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran".

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 59/2007, dan Prmendagri 21/2011 mendefinisikan bahwa: "Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DIPA-SKPD".

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 59/2007, dan Prmendagri 21/2011 mendefinisikan bahwa: "Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM".

Berdasarkan definisi diatas SPP, SPM, dan SP2D merupakan dokumen sumber transaksi dalam pembuatan Laporan Keuangan pada SAIBA. SPP adalah dokumen untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPM adalah dokumen untuk mencairkan dana. Dan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana berdasarkan SPM.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada PSTA LAPAN Bandung

Dalam pelaksanaan kerja praktek adapun prosedur penyelesaian SPP-LS sampai dengan SPM-LS, prosedur penyelesaian SP2D, dan prosedur pembuatan laporan keuangan.

A. Prosedur penyelesaian SPP-LS sampai dengan SPM-LS adalah sebagai berikut:

1. Penerima hak dari PSTA LAPAN (orang-orang yang mempunyai hak didalam pembuatan RKA-KL) mengajukan tagihan ke KPPN untuk mencairkan dana yang sudah terlampir didalam RKA-KL dengan disertai dokumen pendukung seperti SPP, SPM, dan RKA-KL.
2. Tagihan penerima hak diserahkan kepada Bapak Muzirwan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berupa SPP-LS dengan disertai dokumen pendukung seperti SPP, SPM, dan RKA-KL. Apabila dana yang tercantum dalam RKA-KL melebihi dana yang dikeluarkan maka harus dikembalikan lagi.
3. Setelah SPP-LS diproses lalu diserahkan kepada Bapak Nurkhamdani selaku PP-SPM (Pejabat Penandatanganan SPM) yang berupa SPM-LS untuk ditandatangani dengan disertai dokumen pendukung seperti SPP, SPM, dan RKA-KL. Tidak hanya dokumen pendukung berupa kertas-kertas dokumen tetapi harus dibuat ADK (Arsip Data Komputer) yang hanya bisa dibaca pada

software tertentu saja salah satunya adalah SAIBA dan yang bisa membuka ADK tersebut hanya DJPB dan KPPN saja.

4. Ketika sudah ditandatangani oleh PP-SPM maka SPM-LS diserahkan kepada KPPN dengan disertai dokumen pendukung berupa (SPP, SPM, dan RKA-KL) dan juga ADK. Apabila KPPN menyetujui maka dana yang ditagih oleh penerima hak dapat segera dicairkan melalui Bank.

B. Prosedur Penyelesaian SP2D

1. Bagian Perbendaharaan dari satuan kerja PSTA LAPAN menyiapkan dokumen SPM-LS dan ADK
2. ADK tersebut menjadi dokumen penting dalam pembuatan SP2D
3. Ketika SP2D sudah selesai dibuat lalu oleh pihak bendahara SP2D tersebut diserahkan kepada Bank untuk mencairkan uang
4. Oleh pihak Bank SP2D tersebut diperiksa apakah sudah sesuai dengan yang ada dalam RKA-KL beserta dokumen pendukungnya. Apabila salah satu dokumen pendukung tidak lengkap maka uang tidak dapat dicairkan oleh pihak Bank
5. Setelah SP2D diperiksa oleh pihak Bank dan semua dokumen pendukung sudah lengkap dan sudah sesuai dengan yang ada di RKA-KL maka uang dapat dicairkan oleh pihak Bank
6. Setelah uang sudah cair maka harus dibuat laporan keuangannya

C. Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan

Dalam pembuatan laporan keuangan, harus adanya dokumen sumber transaksi, dalam hal ini adalah:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2. Surat Perintah Membayar (SPM)
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Berikut ini adalah cara pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan SAIBA:

1. **Klik menu Transaksi → daftar SPM dan SP2D.**

Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk Satker yang bersangkutan.Tampilan daftar SPM adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tampilan Daftar SPM

Tampilan Daftar SPM terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :

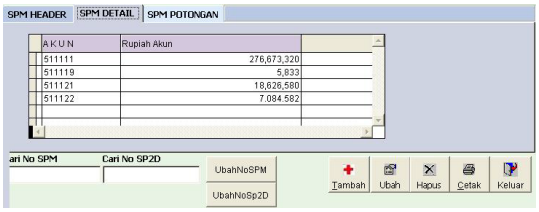
- Tampilan SPM Header
- Tampilan SPM Detail
- Tampilan SPM Potongan

Untuk melihat tampilan SPM Detail dan SPM Potongan untuk masing-masing SPM Header dilakukan dengan cara

1. Klik **SPM HEADER**

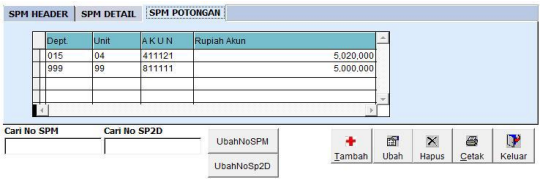
2. Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud
3. Klik **SPM DETAIL** atau **SPM POTONGAN**
4. Klik tombol Tambah untuk memulai perekaman.

Tampilan layar untuk SPM Detail adalah sebagai berikut:



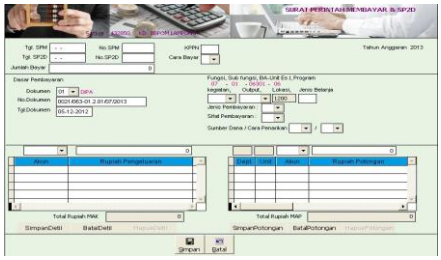
Gambar 3.2 Tampilan SPM Detail

Sedangkan untuk tampilan SPM Potongan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3 Tampilan SPM Potongan

Tampilan layar untuk tambah SPM adalah sebagai berikut:



Gambar 3.4 Tampilan SPM Sebelum Diinput pada SAIBA

Tampilan Tambah Daftar SPM terdiri dari isian sebagai berikut:

- Satker : Otomatis, sesuai setup lokasi.
- Tgl. SPM : Diisi dengan tanggal SPM.
- No. SPM : Diisi dengan nomor SPM.

- Tgl. SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D.
- No. SP2D : Diisi dengan nomor SP2D.
- Jumlah Bayar : Diisi dengan jumlah bersih rupiah SPM/SP2D.
- KPPN : Diisi dengan kode KPPN
- Cara Bayar : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara bayar.
- Dokumen : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode dokumen.
- No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen.
- Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
- Fungsi/SubFungsi/BA-Unit Es I/Program: Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode output.
- Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi.
- Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja.
- Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis pembayaran.
- Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sifat pembayaran.
- S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sumber dana.
- C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara penarikan.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun.

- Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran.
- Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Akun : Diisi dengan kode akun Potongan.
- Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan.

2. Pencetakan Daftar Transaksi

Klik 

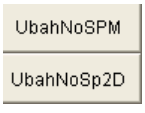
untuk mencetak kertas kerja yang berisi elemen-elemen data SPM yang telah direkam. Selanjutnya akan ditayangkan Daftar Transaksi yang dimaksud sehingga siap dicetak. Daftar Transaksi tersebut akan diverifikasi kembali dibandingkan dengan dokumen sumbernya. Apabila ditemukan ketidakcocokkan dengan dokumen sumber maka Operator Komputer akan membuatkan pembetulan dengan cara:

- Klik tombol 

- Letakan kursor pada baris data yang salah.
- Setelah dibetulkan, klik 

.

Apabila setelah diverifikasi terdapat kesalahan nomor SPM atau nomor SP2D, maka nomor

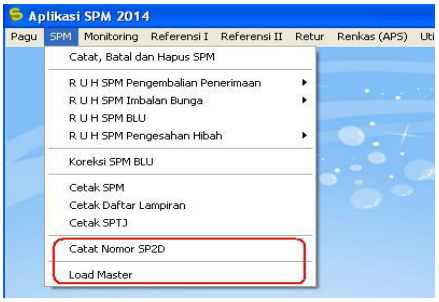
SPM/SP2D tersebut dapat diubah melalui tombol 

. Apabila aplikasi SPM sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka perekaman data SPM/SP2D dapat dilakukan dengan proses peng-copy-an data SPM tersebut

kedalam aplikasi SAIBA. Sebelumnya, pada aplikasi SPM, nomor SP2D untuk SPM tersebut telah dilakukan proses Catat Nomor SP2D dan dilakukan proses Load Master.

Database aplikasi SPM harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA 2014. Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi aplikasi SAIBA 2014 sudah terkoneksi dengan database aplikasi SPM.

Untuk copy SPM/SP2D dari aplikasi SPM, SPM yang sudah mendapatkan nomor SP2D harus dilakukan proses Catat SP2D dan Load Master pada aplikasi SPM.



Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi SPM

Klik Transaksi → Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb:



Gambar 3.6 Tampilan Copy DIPA dari Aplikasi SPM

Tampilan Proses Copy DIPA dari Aplikasi SPM terdiri dari isian sbb:

User SPM : Diisi User SPM yang tidak digunakan.

Password SPM : Diisi password SPM yang tidak digunakan.

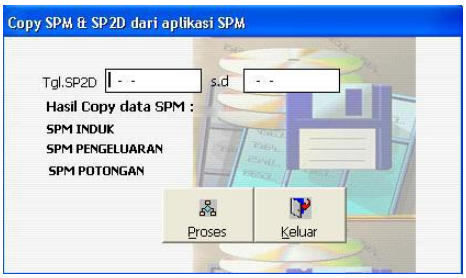
Server SPM : Diisi dengan lokasi server SPM.

Tombol 

digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SPM 2014.

Tombol 

digunakan untuk keluar dari menu.



Gambar 3.7 Tampilan Copy SPM & SP2D dari aplikasi SPM

Tampilan Proses Copy Data SPM dan SP2D terdiri dari isian sbb:

Tgl SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D (dari tanggal dan sampai tanggal SP2D yang hendak dicopykan ke aplikasi SAK). Hasil Copy data SPM: Otomatis.

Tombol 

digunakan untuk melakukan proses copy.

Tombol 

digunakan untuk keluar dari menu.

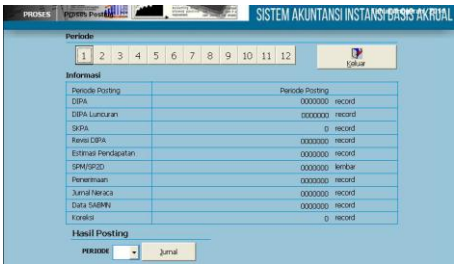
3. Proses Posting

Klik menu Proses → Posting

Proses Posting dilakukan untuk memindahkan transaksi yang telah tercatat dan benar ke Buku Besar. Proses posting ini dilakukan setiap bulan. Jika terdapat

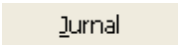
perubahan transaksi pada bulan yang telah dilakukan proses posting, maka transaksi pada bulan tersebut harus dilakukan posting ulang

Tampilan layar untuk Proses Posting adalah sbb:



Gambar 3.8 Tampilan Proses Posting pada SAIBA

Tabel Periode dapat dipilih sesuai dengan periode posting data tersebut. Tabel Informasi memberikan informasi jumlah record dari masing-masing transaksi pada periode tersebut.

Tombol 

digunakan untuk menampilkan jurnal hasil dari proses posting.

Tombol 

digunakan untuk keluar dari proses Posting.

Setelah jurnal-jurnal tersebut di posting ke dalam buku besar dan dilakukan proses akuntansi selanjutnya menginput transaksi realisasi, transaksi penyesuaian, dan jurnal neraca dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan maka jurnal-jurnal tersebut akan menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Neraca.

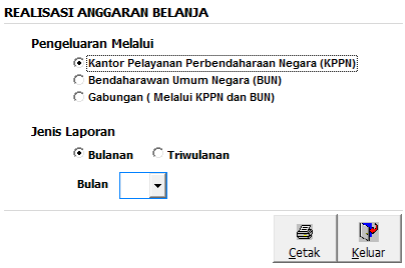
4. Pencetakan Laporan

Klik menu Laporan → Pilih laporan yang akan dicetak



Gambar 3.9 Tampilan Laporan yang akan Dicetak

Pada masing-masing menu laporan akan diminta mengisikan format dari jenis laporan yang akan dicetak. Misalnya akan mencetak Laporan Realisasi Anggaran Belanja, maka akan muncul tampilan sbb:



Gambar 3.10 Tampilan Realisasi Anggaran Belanja

Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Pengeluaran Melalui : Dipilih Pengeluaran melalui KPPN, BUN atau Gabungan (KPPN dan BUN).
- Jenis Laporan : Dipilih laporan Bulanan atau Triwulanan.

5. Pengiriman ADK

Pengiriman ke KPPN

Klik Proses → Pengiriman Data ke KPPN

Sub menu Pengiriman ke KPPN digunakan untuk melakukan proses pengiriman data ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk proses rekonsiliasi**.**

Tampilan layar Pengiriman Data ke KPPN adalah sbb:



Gambar 3.11 Tampilan Pengiriman Data ke KPPN (ADK)

Tampilan Proses Pengiriman ke KPPN terdiri dari isian sbb:

- Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan periode pengiriman.
- KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode KPPN.
- Copy Ke : Diisi/pilih menggunakan tombol sesuai dengan lokasi media yang akan dicopy (bisa ke disket atau ke flash disk).

Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses pengiriman data. Tombol Keluar digunakan apabila proses telah selesai.

3.2.1.2 Kendala yang Terjadi di Dalam Prosedur Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada PSTA LAPAN Bandung

Tidak ada aplikasi yang beredar di dunia ini yang tidak memiliki kendala, begitu pula pada aplikasi SAIBA. Beberapa kendala yang dimiliki oleh SAIBA adalah sebagai berikut:

- Ketika kita bingung memilih kode akun, kita akan menggunakan kolom pencarian seperti halnya yang ada pada SAKPA, Sayangnya kolom pencarian pada SAIBA tidak dapat mengakomodasi kebutuhan ini.
- Masih adanya akun persediaan yang belum diregister dan akun asset yang belum diregister
- Dalam menggunakan aplikasi SAIBA masih belum stabil. Masih ada beberapa akun dan tools yang belum bisa digunakan secara maksimal.

Dengan demikian akan memperlambat kerja dan menghambat beberapa aktivitas dalam pembuatan laporan keuangan.

3.2.1.3 Upaya yang Dilakukan Atas Kendala yang Terjadi Mengenai Prosedur Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada PSTA LAPAN Bandung

Dalam setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Dalam hal ini kendala yang ada pada SAIBA pasti ada upayanya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan:

- Melakukan update terbaru SAIBA versi 2.4 dan 2.5
- Untuk menghilangkan persediaan dan asset yang belum diregister maka dibutuhkan jurnal penyesuaian.
- Mengkonsultasikan kendala apa yang sedang dihadapi ke KPPN. Biasanya KPPN akan memberitahukan untuk tindak lanjut berikutnya agar kendala yang dihadapi bisa terselesaikan.

- Melakukan rekon ulang. Rekon ulang ini dilakukan tidak hanya dari PSTA LAPAN saja tetapi KPPN juga melakukan rekon ulang untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi.

Dengan demikian kendala yang terjadi pada saat mengaplikasikan SAIBA dapat terselesaikan dengan baik apabila kita melakukannya sudah sesuai dengan petunjuknya.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Analisis Prosedur Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada PSTA LAPAN Bandung

Prosedur yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkeu. PSTA LAPAN pun sudah mengikuti peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa sistem akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah harus berdasarkan basis akrual. PSTA LAPAN sudah mengaplikasikannya dengan menggunakan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dalam pembuatan laporan keuangan. Namun dalam prosedur SAIBA masih terdapat masalah karena sistem yang belum stabil. Maka dari itu perlu ada perbaikan dari pihak operator agar sistem pada aplikasi SAIBA dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3.2.2.2 Analisis Kendala yang Terjadi di Dalam Prosedur Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada PSTA LAPAN Bandung

Walaupun prosedur yang dilakukan oleh PSTA LAPAN sudah baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan tetapi masih terjadi kendala pada aplikasi SAIBA tersebut yaitu dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (BAR) masih sering tertunda karena belum stabilnya Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Dalam penginputan data di SAIBA masih terjadi masalah tidak terbacanya di aplikasi SPAN Kemenkeu yang akhirnya terjadi ketidaksesuaian. Selain itu juga mengenai persediaan dan asset yang belum diregister. Hal ini dikarenakan masih tidak terdeteksi atau terbacanya beberapa akun MAK (Mata Anggaran Kumulatif) pada persediaan dan asset karena proses peralihan dari kas basis ke akrual basis. Kendala yang terjadi pada SAIBA tersebut dapat menghambat dalam pembuatan laporan keuangan sehingga akan membuang waktu pekerjaan yang harusnya bisa selesai dalam waktu yang sudah ditentukan malah menjadi lama tidak sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan.

3.2.2.3 Analisis Upaya yang Dilakukan Atas Kendala yang Terjadi Mengenai Ptosedur Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada PSTA LAPAN Bandung

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada aplikasi SAIBA di PSTA LAPAN sudah baik tetapi masih saja ada hambatan yang terjadi ketika sudah melakukan upaya tersebut. Biasanya untuk mengatasi masalah tersebut dengan

melakukan update SAIBA versi terbaru. Namun biasanya setelah melakukan update SAIBA versi terbaru masih saja ada kendala yang terjadi yang memang sampai saat ini sulit untuk diperbaiki. Dalam SAIBA masih ada akun yang merupakan akun dalam kas basis seperti persediaan dan asset yang belum diregister. Untuk menghilangkan akun tersebut biasanya dibutuhkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tersebut merupakan cara terakhir untuk memperbaiki neraca. Karena akun asset dan persediaan yang belum diregister apabila tidak dihilangkan akan mengganggu atau tidak enak dilihat ketika akan melihat neraca. Maka dari itu perlu diperbaiki atau dihilangkan agar menjadi lebih baik.